

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggoro, T. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Ashiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Konstitusi Press.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal :

- Adnan, & Nasrullah.(2021). “Kajian Penetapan Tunjangan Perumahan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*.
- Azbari, S. A. S., & M.Pei Psikolog, A. A. (2024). Menggali Aspirasi Generasi Z: Persepsi Generasi Z Terhadap Citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). *Sarekara Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1).
- Erwanto, Nabila Mauldy, Eva Shifdlotul Gisna, Carlos Damero, Nabila Izzaba Fillard, Baihaqi Abdul Hakim, dan Kuswan Hadji. (2024). "Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 3, no. 3.
- Fiqri, I. N., Fatimah, S., & Fitrisia, A. (2025). Kebijakan kenaikan penghasilan DPR: Analisis nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan etika sosial. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, Vol. 9, No. 4.
- Inayah, Ghina (2023). “Pandangan Masyarakat Terhadap Kinerja DPR RI Di Era Reformasi”.

- Mahendra, Muhammad Raka.(2021). “Analisis *Fiqh siyasah* Terhadap Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hukum Tata Negara Indonesia”.
- Monitasari, R. G. (2025). Revitalisasi kelembagaan DPR melalui reformasi tata kelola anggaran dalam perspektif hukum tata negara terhadap isu tunjangan DPR. *Jurnal Sosial Humaniora (Silatene)*, 3(1).
- Nisa, Ananda Hulwatun, Hidayatul Hasna, dan Linda Yarni.(2023). “Persepsi,” KOLONI: *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No.
- Omara, Andi, dkk. (2021).“Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR dalam Perspektif Reformasi Konstitusi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 2.
- Rahmansyah, R. A., Praditya, D., Nabilah, N., & Nurjanah, A. S. (2023). Studi hukum berdasarkan tipe-tipe keadilan perspektif Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1).
- Rahmansyah, R. A., Praditya, D., Nabilah, N., & Nurjanah, A. S. (2023). Studi hukum berdasarkan tipe-tipe keadilan perspektif Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25.
- Rio, M. B., Dewi, R. K., & Agustina, S. (2021). Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 5(2).
- Satya,V.E. (2020). "PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DANA PENANGANAN PANDEMI COVID-19", *Info Singkat Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*. Vol. XII, No. 13.
- Slamet Suhartono.(2020). “Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2.
- Sugianto, E. (2020). Sumber pendapatan negara menurut cendekiawan Muslim Imam al-Mawardi. Vol. 5, No.2
- Zulkifli. (2023). Konsep ketaatan kepada ulu al-amr (Analisis hadis riwayat Bukhari No. 7056 dan hadis riwayat Muslim No. 1709). *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1).

Undang-Undang :

DPR RI. (1980). UU No. 12 Tahun 1980 Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

DPR RI. (2014a). Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan.

DPR RI. (2025). PP No. 75 Tahun 2000 Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Keppres 59/2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2014). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2014 tentang tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

UUD Tahun 1945 Pasal 20A ayat (1) tentang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Skripsi :

Almustofa, A. R. (2021). Persepsi Warganet Tentang Citra Pemerintah Kota Kediri pada Akun Instagram @pemkotkediri di Masa Pandemi Covid-19. (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri).

Helma Mutia, F. (2022). Konsep keadilan menurut Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Internet :

Alfi Kholisdinuka. (2025). *Pimpinan DPR Luruskan Isu Kenaikan Gaji Anggota hingga Tunjangan Perumahan.* Detiknews. [https://news.detik.com/berita/d-8070653/pimpinan-dpr-luruskan-isu-kenaikan-gaji-anggota-hingga tunjangan-perumahan](https://news.detik.com/berita/d-8070653/pimpinan-dpr-luruskan-isu-kenaikan-gaji-anggota-hingga-tunjangan-perumahan) diakses pada tanggal 18 November 2025.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2025). *Dashboard penanganan darurat banjir dan longsor Sumatera 2025.* <https://gis.bnpb.go.id/bansorsumatera2025/> diakses pada tanggal 18 November 2025.

Badan Pusat Statistik. (2025). *Rata-rata upah/gaji (Rupiah) (Tabel statistik—Biaya tenaga kerja).* <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUyMSMy/rata-rata-upah-gaji.html>, diakses pada tanggal 18 November 2025.

Dasar Hukum Pemberian Tunjangan Perumahan DPR. (22 Agustus 2025). Diperoleh 8 September 2025, dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/tunjangan-perumahan-dpr-lt68a83d8f2a78a/>

Tunjangan perumahan DPR RI: *Anggota akan diberikan lewat instrumen tunjangan, bukan rumah jabatan.* (n.d.). (2025). Diperoleh 18 November 2025 HukumOnline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tunjangan-perumahan-dpr-lt68a83d8f2a78a/>

Yuantisya, M. (2024). *Berapa tunjangan perumahan anggota DPR 2024–2029 yang tak dapat rumah dinas?* <https://www.tempo.co/ekonomi/berapa-tunjangan-perumahan-anggota-dpr-2024-2029-yang-tak-dapat-rumah-dinas--2748> diakses pada tanggal 18 November 2025.